

ABSTRAK

Salah satu isu yang selalu dihadapi oleh industri pariwisata yaitu masih adanya pungutan liar. Pungutan liar apabila terus berlanjut dan tidak ditangani dengan tepat waktu, hal ini akan menghambat pengembangan kawasan wisata dan menciptakan citra kawasan wisata yang buruk dan mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata tersebut. Fenomena pungutan liar juga terjadi di Kabupaten Sumenep sebagai salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura yang banyak memiliki destinasi pariwisata terbanyak di Pulau Madura. Tentunya upaya untuk meminimalisir adanya pungutan liar tersebut diperlukan peran dari lembaga yang memang memiliki otoritas untuk mengembangkan pariwisata dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini meliputi peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam upaya penanggulangan pungutan liar di kawasan wisata serta faktor penyebab terjadinya pungutan liar di kawasan wisata dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam mengatasi pungutan liar di kawasan wisata.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari wawancara, observasi, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, beberapa tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep serta penyebaran kuis secara langsung terhadap beberapa wisatawan yang berkunjung. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari teknik triangulasi kemudian menyimpulkan apakah hipotesis diterima ataukah ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran dari Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Sumenep dalam upaya penanggulangan praktik pungutan liar di kawasan wisata.
2. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di kawasan wisata disebabkan oleh adanya faktor sosiologis yaitu adanya kaplingan-kaplingan kekuasaan berupa adanya kaplingan-kaplingan kekuasaan didalamnya seperti adanya jalur-jalur tikus tanpa melalui akses pintu utama serta pemanfaatan lahan untuk parkir. Sementara kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam mengatasi pungutan liar di kawasan wisata antara lain kurangnya kesadaran hukum pada masyarakatnya dan pemahaman yang salah tentang tanah pemerintah yang dapat dinikmati secara bebas.

Kata Kunci: Pungutan liar, Peran Lembaga, Sektor Pariwisata

ABSTRACT

One of the issues that is always faced by the tourism industry is the existence of illegal levies. Illegal levies if they continue and are not handled in a timely manner, this will hinder the development of tourist areas and create a bad image of the tourist area and reduce the interest of tourists to visit the tourist area. The phenomenon of illegal levies also occurs in Sumenep Regency as one of the regencies on Madura Island which has the most tourism destinations on Madura Island. Of course, efforts to minimize the existence of illegal levies require the role of institutions that do have the authority to develop tourism and other related institutions. The issues raised in this study include the role of the Culture and Tourism Office of Sumenep Regency in efforts to overcome illegal fees in tourist areas as well as the factors causing illegal fees in tourist areas and the obstacles faced by the Sumenep Regency Culture and Tourism Office in overcoming illegal fees in the area. tour.

This research is an empirical legal research with an empirical juridical approach. The data used include primary data, secondary data and tertiary data obtained from interviews, observations, at the Culture and Tourism Office of Sumenep Regency, several tourism places in Sumenep Regency as well as direct distribution of questionnaires to several visiting tourists. The entire data obtained was analyzed descriptively qualitatively by drawing conclusions by collecting all the data obtained from the triangulation technique and then concluding whether the hypothesis was accepted or rejected based on the collected data. Based on the analysis carried out, the following results were obtained:

1. The role of the Culture Service and Sumenep Regency is not yet optimal in efforts to overcome the practice of illegal fees in tourist areas.
2. Factors causing illegal levies in tourist areas are caused by sociological factors, namely the existence of power plots in the form of power plots in them such as the presence of rat lanes without going through the main door access and the use of land for parking. Meanwhile, the obstacles faced by the Culture and Tourism Office of Sumenep Regency in overcoming illegal levies in tourist areas include a lack of legal awareness in the community and a wrong understanding of government land that can be enjoyed freely.

Keywords: Illegal levies, Role of Institutions, Tourism Sector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	11
1.6.4 Sumber Data.....	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6 Metode Analisa Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP PARIWISATA, PUNGUTAN LIAR, KORUPSI DAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI).....	15
2.1 Pariwisata Di Kabupaten Sumenep.....	15
2.1.1 Konsep Pariwisata Di Kabupaten Sumenep.....	15
2.1.2 Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Sumenep.....	16
2.1.3 Konsep Pariwisata Dan Lembaga Selaku Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata.....	19
2.2 Pungutan Liar, Korupsi Dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS PUNGLI)	23
2.2.1 Definisi Dan Ruang Lingkup Pungutan Liar.....	23
2.2.2 Pungutan Liar Sebagian Dari Tindak Pidana Korupsi.....	26

2.2.3 Teori Penanggulangan.....	31
2.2.4 Tugas, Wewenang Satuan Tugas Pungutan Liar Dan Kedudukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN WISATA.....	34
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian Dan Struktur Organisasi	
3.1.1 Profil Lokasi Penelitian.....	34
3.1.2 Macam-Macam Wisata Di Kabupaten Sumenep.....	37
3.1.3 Pengelola Sektor Pariwisata.....	41
3.2 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumenep Dalam Menanggulangi Praktik Pungutan Liar Di Kawasan Wisata, Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pungutan Liar dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar Di Kawasan Wisata.....	49
3.2.1 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumenep Dalam Menanggulangi Praktik Pungutan Liar Di Kawasan Wisata.....	49
3.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pungutan Liar dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar Di Kawasan Wisata.....	55
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR SINGKATAN

1. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar disingkat menjadi satgas saber pungli
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat menjadi SKPD
3. Sensus Penduduk 2020 disingkat menjadi SP2020
4. Pungutan Liar disingkat menjadi pungli
5. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat menjadi KPK

DAFTAR TABEL

Tabel I Keaslian Penelitian.....	7
Tabel II Macam-Macam Pariwisata Di Kabupaten Sumenep.....	37